
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REVISI
Pagu Selfblocking

RENCANA KERJA 2016

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Kerja (RENJA) Pagu Selfblocking Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Revisi Rencana Kerja Pagu Selfblocking Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

Revisi Rencana Kerja Pagu Selfblocking Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berisi gambaran unit kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2016, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di tahun 2016.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 2016

Ttd

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Kondisi Saat Ini	2
1.3	Struktur Organisasi dan Tupoksi	3
BAB II	STRATEGI RENCANA KERJA	
2.1	Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan	5
2.2	Sasaran Indikator Kinerja Unit Kegiatan	6
BAB III	STRATEGI PENCAPAIAN	
3.1	Metode Pelaksanaan	8
3.2	Tahapan Pelaksanaan	9
BAB IV	KERANGKA PENDANAAN	23
BAB V	PENUTUP	28
	Lampiran - Lampiran	
	Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Program dan Evaluasi tahun 2016	24
	Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Hukum dan Kerjasama Teknis tahun 2016	25
	Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Keuangan dan Umum tahun 2016	26
	Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Layanan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tahun 2016	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Disebutkan bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya Unit Kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Upaya Kerja tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan Kementerian LHK Tahun 2015-2019. Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK tahun 2016 ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal PHLHK, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

1.2 Kondisi Saat Ini

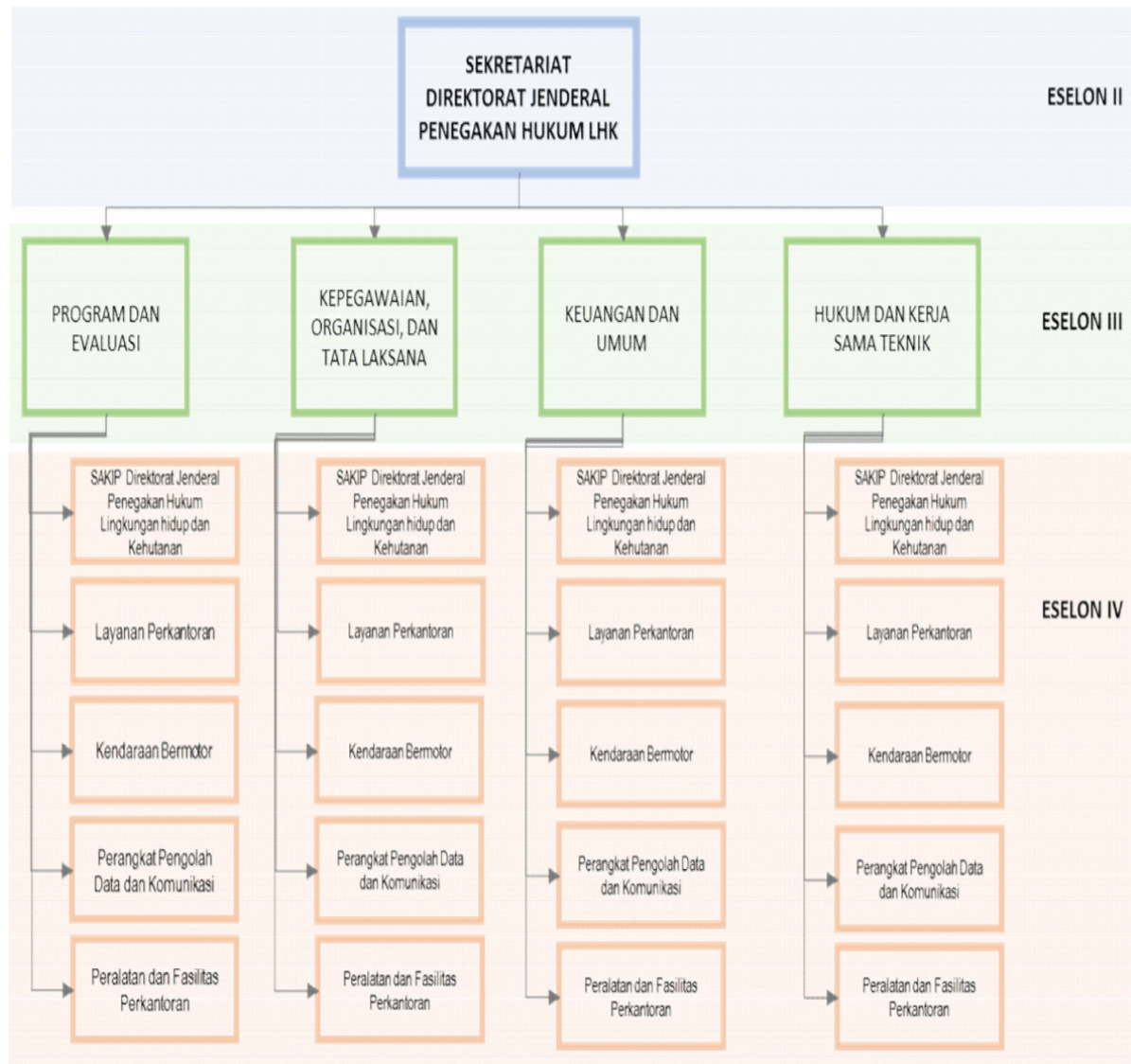
Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kinerja yang dicapai pada Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHLHK berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah Kerja dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Dalam lampiran Inpres tersebut tertuang besaran penghematan dari masing-masing K/L, dimana penghematan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 871,727 miliar, dan ini turut mempengaruhi Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kebijakan selfblocking anggaran di tahun 2016 dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilingkup satuan kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah di dalam penghematan APBN-P tahun 2016.

1.3 Struktur Organisasi dan Tupoksi

Sesuai dengan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja dengan struktur organisasi yang disusun dan diagram Gambar ;

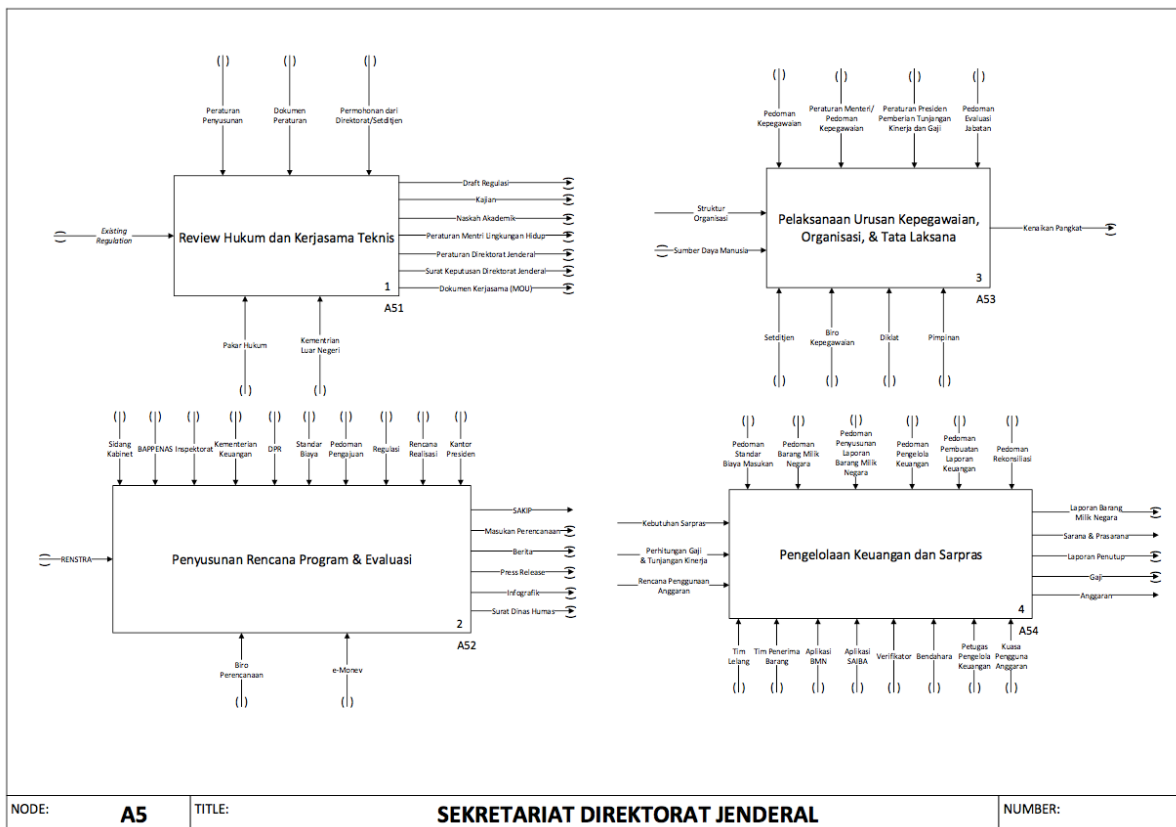


Gambar Struktur Organisasi

Adapun pada Pasal 1112 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.



Gb Bisnis Proses Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK

BAB II STRATEGI RENCANA KERJA

2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dijabarkan dalam buku Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis yang mengalir dari hulu hingga memberi dampak di hilir. Rencana strategis Sekretariat Direktorat telah dikemas menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar rencana-rencana Sekretariat Direktorat ini dapat memberi pengaruh untuk mengenai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana kerja 2016 ini dilakukan dengan secara hati-hati dan seksama agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis. Sehingga apa yang dilaksanakan benar-benar akan mampu membawa lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia ke arah yang positif. Untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Kerja ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis.

Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis sudah ditetapkan dalam penyusunan Rencana Strategi Kementerian untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mendukung terlaksananya kegiatan dan sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang sinergis dan tepat sasaran. Melanjutkan rencana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat perencanaan strategis untuk menetapkan sasaran elemen kegiatan dan indikator yang menopang dan membangun aktivitas pencapaian sasaran unit kegiatan.

KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan minimal 78.00 (A) di tahun 2019

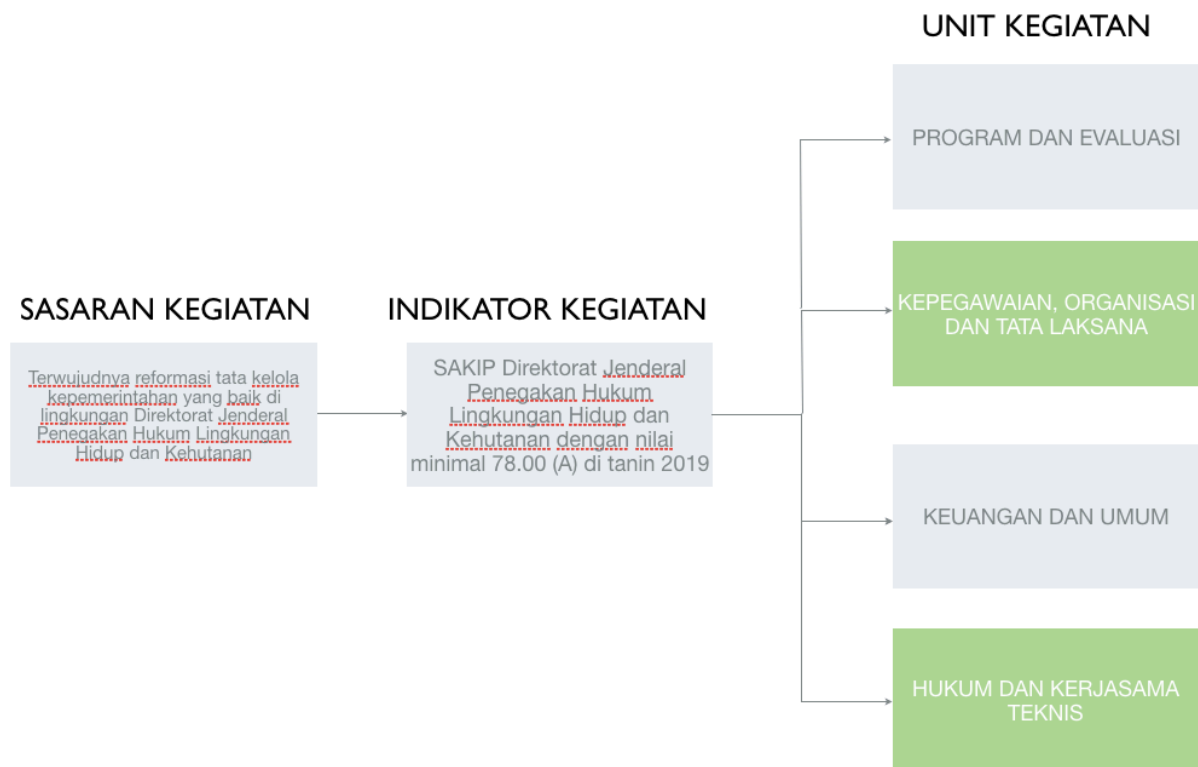
Gb. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK

Skema alur *logic model* mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK dijelaskan pada Gambar 2.2. Sasaran dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK ialah bahwa reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terwujud.

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan

Melanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan.

Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dipastikan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seperti pada Gambar 2.3. Pada Direktorat ini, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sasaran kegiatannya. Oleh karena itu, Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, serta Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknis.



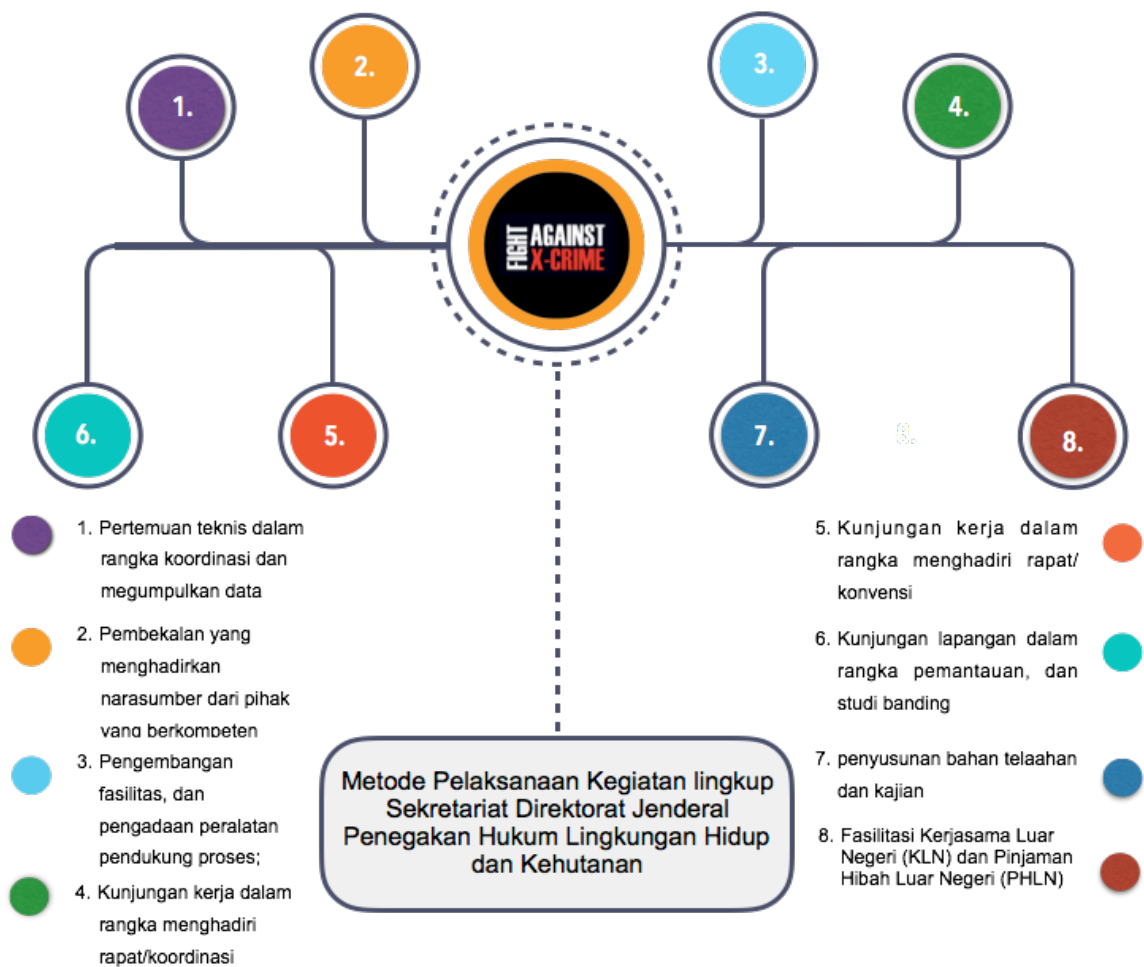
Gb. Relasi Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Unit Kegiatan

BAB III STRATEGI PENCAPAIAN

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kombinasi dari swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga dengan penyiapan beberapa metode pelaksanaan yang meliputi:



Gb. Metode Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.2 Tahapan Pelaksanaan

Didalam tahapan pelaksanaan layanan dukungan manajemen Eselon I, untuk mencapai Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 72 Poin pada Tahun 2016, maka di butuhkan uraian Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di rangkum sesuai Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Volume	Satuan
Program dan Evaluasi (UK1)				
1	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95	Persentase
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	72	Poin
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	78	Unit Pelaksana Teknis
2	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK			
		Jumlah berita media mengenai kegiatan penegakan hukum LHK kepada masyarakat	80	Berita media
		Jumlah Kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial	12	Media
3	Tercapainya data dan informasi PHLHK			

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun	1	Satker
		Jumlah Publikasi Penegakan Hukum LHK	85	Publikasi
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK	12	Bulan
No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Volume	Satuan
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (UK2)				
1	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen PHLHK			
		Tersedianya polsi hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten	3225	Orang
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	188	Orang
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	204	Orang
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	238	Orang
2	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien			
		Jumlah UPT Penegakan Hukum yang efektif dan efisien	77	UPT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Volume	Satuan
Keuangan dan Umum (UK3)				
1	Meningkatnya Administrasi Keuangan Ditjen PHLHK			
		Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	Opini
2	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK			
		Jumlah Manajemen aset		
		Jumlah Sarana dan Prasarana LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK		
No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Volume	Satuan
Hukum dan Kerjasama Teknis (UK4)				
1	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK			
		Jumlah rancangan kebijakan strategis	2	Dokumen
		Jumlah NSPK	5	Dokumen
2	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK			
		Jumlah bantuan hukum Ditjen PHLHK	5	Kegiatan

Didalam tahapan pelaksanaan Unit Kegiatan di dalam layanan dukungan manajemen Eselon I, untuk mendukung tercapainya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 72 Poin pada Tahun 2016, maka di butuhkan uraian Elemen Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di rangkum sesuai dengan hasil revisi dokumen penganggaran pagu selfblocking di akhir tahun 2016 dan perubahan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Program dan Anggaran (EK1.1)				
1	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017	Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017	1	Dokumen
		Pencetakan Buku RKP 2017	100	Buku
2	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017	Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017	1	Dokumen
3	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang PHLHK tahun 2016	Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016	100	Orang
4		Terlaksananya Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20	Orang

b. Penyusunan Dokumen Anggaran

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Program dan Anggaran (EK1.2)				
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK TA 2017	Tercapainya Penyusunan Juknis Penyusunan Anggaran Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Keputusan Dirjen
2	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya bidang PHLHK Tahun 2017	Tercapainya Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	1	Keputusan Dirjen
3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran Bidang PHLHK Tahun 2017	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	Dokumen
4	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran bidang PHLHK Tahun 2017	Terlaksananya Pemanjapan Penyusunan RKA K/L Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	1	Laporan
5	Tersedianya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016	Terlaksananya Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016, 10 Bulan	1	Kelompok
6		Tercapainya Proses Bisnis Penganggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Buku
7		Telaksananya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	1	Kelompok

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8		Terlaksananya Reviu Anggaran Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7	Laporan
9		Terlaksananya Satuan Petugas Khusus Penyelesaian Pengawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1	Laporan

c. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi (EK2.1)				
1	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK	Terlaksananya Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK		
2	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan Evaluasi LAKIP tahun 2016	Tercapainya Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PHLHK Tahun 2015,		
3	Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK	Terlaksananya Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK, 1 Kegiatan		
4	Terlaksananya kegiatan pemantapan, evaluasi dan pelaporan (PEP) pelaksanaan kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC	Terlaksananya Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC, 1 Kegiatan		
5	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan tahunan Ditjen PHLHK tahun 2016	Tercapainya Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2015, 1 Dokumen		
6	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan PHLHK	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK, 1 Kegiatan		
7	Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK tahun 2016	Tercapainya Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016, 1 Dokumen		

d. Pengelolaan Data dan Informasi dan Kehumasan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi (EK2.2)				
1	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK tahun 2015	Tercapainya Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015		
2	Tersedianya penyajian informasi pembangunan kehutanan bidang GAKKUM LHK	Terlaksananya Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK		
3	Tersedianya penyebarluasan informasi bidang PHLHK	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bidang PHLHK		
4	Terlaksananya pameran penegakan hukum LHK	Terlaksananya Pameran Penegakan Hukum LHK		
5	Terlaksananya pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum		
6		Terlaksananya Maintenance Aplikasi dan Publikasi Penegakan Hukum LHK		

e. Kemitraan dan Kerjasama DN

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Kerjasama Teknis (EK3.1)				
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Tercapainya Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1	Dokumen
2		Terlaksananya Launching Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Dokumen

f. Penyusunan Kerjasama Luar Negeri

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Kerjasama Teknis (EK3.2)				
1	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen

g. Penyusunan Rancangan Perundang-undangan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Hukum (EK4.1)				
1	Tersedianya database Peraturan Perundang undangan bidang GAKKUM	Tercapainya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	9	Dokumen
2	Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan perundang undangan	Terlaksananya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan	7	Dokumen
3	Terlaksananya Sosialisasi tentang Peraturan Bidang PHLHK			
4	Tersedianya Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan			

h. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Unit
Sub Bagian Kepegawaian (EK5.1)				
1	Terlaksananya kegiatan penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan Bidang Kepegawaian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK	1	Laporan
2	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK	Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan
3	Terlaksananya Kegiatan Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK	1	Laporan
4	Terlaksananya Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian	Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan UPT PHLHK	1	Laporan
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			
6	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK			
7	Tersedianya Tata Naskah Dinas Kepegawaian			
8	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan			

i. Penyusunan Organisasi dan Tata Laksana

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Unit
Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana (EK6.1)				
1	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelembagaan lingkup Ditjen PHLHK	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK	5	UPT
2	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Jabatan Fungsional	Tercapainya Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas LH	1	Draft
3	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	1	Laporan

j. Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (EK7.1)				
1	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK	270	Orang

k. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Administrasi Keuangan (EK8.1)				
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuang Bidang PHLHK tahun 2015	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015	1	Dokumen
2	Tersedianya Laporan SAK UAKPA triwulan I dan III tahun 2016	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016	2	Dokumen
3	Terlaksananya koordinasi dan Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker	1	Laporan
4	Terlaksananya kegiatan penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK tahun 2016	Terlaksananya Penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016	1	Laporan
5		Terlaksananya Pembahasan Kegiatan BP/BPP Satker Setditjen Gakum	1	Laporan
6		Terlaksananya Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Revisi DJPB)	1	Laporan

I. Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Administrasi Perlengkapan (EK8.2)				
1	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen PHLHK	Terlaksananya Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum	1	Dokumen
2	Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data barang milik negara	Terlaksananya Pemutakhiran data Barang Milik Negara	1	Dokumen
3	Terlaksananya Pembinaan Pengelola BMN	Terlaksananya Bimtek dan Pembinaan Pengelola BMN	1	Laporan
4		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan terbaru terkait Pengelolaan BMN	1	Laporan
5		Tercapainya Penyusunan Laporan BMN Ditjen Gakum Semester I 2016	1	Dokumen
6		Terlaksananya Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja	1	Dokumen

m. Penyelenggara Ketatausahaan dan Umum

No	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan Rencana Strategis 2015-2019	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan RKA K/L TA 2016	Volume	Satuan
Sub Bagian Ketatausahaan dan Umum				
1	Terlaksananya penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip lingkup Setditjen GAKKUM	Terlaksananya Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKKUM	1	Dokumen
2	Terlaksananya Pengelolaan surat/dokumen dinas	Terlaksananya Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas	1	Laporan
3	Tersedianya layanan Rumah Tangga Pimpinan	Terlaksananya Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Laporan
4		Terlaksananya Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kementerian LHK	1	Laporan

Layanan Internal

a. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Kendaraan Operasional Ditjen PHLHK	4	Unit/12 Bulan

b. Data dan Informasi

No	Uraian	Volume	Satuan
A	Peralatan Pengolah Data	12	Unit/12 Bulan
B	Pengadaan Peralatan Penunjang Ruang Kerja	7	Unit/12 Bulan

Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Bulan

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Terlaksananya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	12	Bulan
2	Terlaksananya Langganan daya dan Jasa	12	Bulan
3	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan	12	Bulan
4	Terlaksananya Biaya Terkait Operasional Satuan Kerja	12	Bulan
5	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pimpinan	1	Laporan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tersedianya Perlengkapan ruang kerja	45	Unit
2	Tersedianya Peralatan Penunjang Kinerja Setditjen PHLHK	4	Unit
3	Tersedianya Meubelair Kantor Ditjen PHLHK	436	Unit
4	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kerja Eselon I	1	Paket

BAB IV KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2016, diuraikan pada Tabel. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah. Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
029.10.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	132,851,754,000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75,313,590,000
5427.002	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Nilai Minimal 78,00 9A) di tahun 2019 [Base Line]	12,045,984,000
	BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	5,013,209,000
	BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	1,116,325,000
	BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	2,225,950,000
	BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	3,690,500,000
5427.994	Layanan Perkantoran	58,167,316,000
5427.995	Kendaraan Bermotor	1,369,940,000
5427.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	201,680,000
5427.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3,528,670,000

Tabel Skenario Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Tabel. Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Program dan Evaluasi
Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	Target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN				
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan			707,450,000
A	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	389,370,000
B	Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017	1	Dokumen	9,300,000
C	Rapat Kerja Bidang PHLHK Tahun 2016	100	Orang	257,480,000
D	Pembahasan Awal RKP Tahun 2018 Ditjen PHLHK	20	Orang	51,300,000
052	Penyusunan Dokumen Anggaran			1,767,514,000
A	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	1	Keputusan	62,675,000
B	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017	1	Keputusan	296,090,000
D	Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	10	Dokumen	249,748,000
E	Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017	1	Laporan	209,650,000
F	Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016	1	Kelompok	430,585,000
G	Proses Bisnis Penganggaran Ditjen Gakum LHK	1	Buku	63,470,000
H	Kelompok Kerja PUG	1	Kelompok	57,970,000
I	Reviu Anggaran Bidang Penegakan Hukum LHK	7	Laporan	234,040,000
J	Satgas Penyelesaian Pengawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1	Laporan	163,286,000
TOTAL				2,474,964,000

SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI				
053	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan			1,080,631,000
A	Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK			49,220,000
B	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PHLHK Tahun 2015			105,151,000
C	Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK			367,089,000
D	Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC			523,001,000
F	Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2015			19,800,000
G	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK			6,140,000
H	Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016			10,230,000
054	Penyusunan Data dan Informasi			1,457,614,000
A	Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015			54,500,000
B	Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK			117,638,000
C	Penyebarluasan informasi bidang PHLHK			564,225,000
D	Pameran Penegakan Hukum LHK			171,955,000
E	Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum			264,255,000
F	Maintenance Aplikasi dan Publikasi Penegakan Hukum LHK			285,041,000
TOTAL				2,538,245,000

Tabel. Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Hukum dan Kerjasama
Teknis Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
SUB BAGIAN KERJASAMA TEKNIS				650,800,000
055	Penyusunan Kemitraan dan Kerjasama Dalam Negeri			179,650,000
A	Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1	Dokumen	120,650,000
B	Launching Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Dokumen	59,000,000
056	Penyusunan Kerjasama Luar Negeri			471,150,000
A	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	1	Dokumen	471,150,000
SUB BAGIAN HUKUM				465,525,000
057	Penyusunan Rancangan Perundang-undangan			465,525,000
A	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	9	Dokumen	287,625,000
B	Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan	7	Dokumen	177,900,000
TOTAL				1,116,325,000

Tabel. Matrik Matrik Kegiatan, Volumen dan Satuan dan Pendanaan Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN				466,615,000
058	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian			466,615,000
A	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK	1	Laporan	126,825,000
B	Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	44,200,000
C	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK	1	Laporan	243,350,000
D	Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan UPT PHLHK	1	Laporan	52,240,000
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				1,759,335,000
059	Penyusunan Organisasi Tata Laksana			770,155,000
A	Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK	5	UPT	703,270,000
B	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas LH	1	Draft	51,325,000
C	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	1	Laporan	15,560,000
060	Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait			989,180,000
A	Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK	270	Orang	989,180,000

Tabel. Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Keuangan dan Umum Tahun 2016

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM				
kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
SUB BAGIAN KEUANGAN				1,381,054,000
061	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan			1,381,054,000
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015	1	Dokumen	231,099,000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016	2	Dokumen	334,984,000
C	Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker	1	Laporan	327,121,000
D	Penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016	1	Laporan	204,650,000
E	Pembahasan Kegiatan BP/BPP Satker Setditjen Gakum	1	Laporan	212,500,000
F	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Revisi DJPB)	1	Laporan	70,700,000
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN				820,136,000
062	Penyelenggaraan Administrasi Perengkapan	1	Dokumen	820,136,000
A	Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum	1	Dokumen	25,150,000
B	Pemutakhiran data Barang Milik Negara	1	Dokumen	250,250,000
C	Bimtek dan Pembinaan Pengelola BMN	1	Dokumen	165,570,000
D	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan terbaru terkait Pengelolaan BMN	1	Dokumen	44,680,000
E	Penyusunan Laporan BMN Ditjen Gakum Semester I 2016	1	Dokumen	171,586,000
F	Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja	1	Dokumen	162,900,000
SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN DAN UMUM				1,489,310,000
063	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum			1,489,310,000
A	Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM	1	Dokumen	154,200,000
B	Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas	1	Laporan	155,250,000
C	Layanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Laporan	1,106,496,000
D	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kementerian LHK	1	Laporan	73,364,000

Tabel. Matrik Kegiatan, Volume dan Satuan dan Pendanaan Layanan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2016

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	target		Anggaran
	uraian	vol	sat	jumlah
5427.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Bulan Layanan	58,167,316,000
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			54,377,530,000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	54,377,530,000
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			3,789,786,000
A	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	12	Bulan	2,335,574,000
B	Langganan daya dan Jasa	12	Bulan	303,992,000
C	Biaya Pemeliharaan	12	Bulan	424,220,000
D	Biaya Terkait Operasional Satuan Kerja	12	Bulan	572,000,000
E	Perjalanan Dinas Pimpinan	1	Laporan	154,000,000
5427.995	Kendaraan Bermotor [Base Line]	4	Unit	1,369,940,000
007	Peralatan dan Mesin			1,369,940,000
A	Kendaraan Operasional Ditjen PHLHK	4	Unit	1,369,940,000
5427.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]	20	Unit	201,680,000
009	Data dan Informasi			201,680,000
A	Peralatan Pengolah Data	12		122,456,000
B	Pengadaan Peralatan Penunjang Ruang Kerja	7		79,224,000
5427.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]	746	Unit	3,528,670,000
007	Peralatan dan Mesin			3,528,670,000
A	Perlengkapan ruang kerja	45		563,636,000
B	Peralatan Penunjang Kinerja Setditjen PHLHK	4		82,000,000
C	Meubelair Kantor Ditjen PHLHK	436		2,675,934,000
D	Perlengkapan Ruang Kerja Eselon I	1		207,100,000

BAB V

PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka 5 tahun dan Rencana Kerja jangka 1 tahun secara sistimatis

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun setelah mengalami perubahan maupun revisi anggaran selfblocking di penghujung akhir tahun. Dengan demikian diharapkan Revisi Rencana Kerja Tahun 2016 Pagu Selfblocking yang telah disusun dapat memperlancar penyusunan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2016.

**GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV LANTAI 4
JL. GATOT SUBROTO, DKI JAKARTA 10270**